



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 170 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2021 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun IKU yang dipergunakan sebagai acuan ukuran kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun IKU yang dipergunakan acuan ukuran kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Guna pencapaian IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah, disusun arsitektur kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 170

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator	Kinerja Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.54	70,75-71,14	70,89-71,39	71,39-71,89	71,89-72,39	72,39-72,89	72,89-73,39	72,89-73,39
2	Indeks Pembangunan Gender	92.19	92,25-92,40	92,55-92,85	92,85-93,05	93,05-93,15	93,15-93,25	93,25-93,50	93,25-93,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.44%	5,3-5,1 %	5,05-4,8 %	4,9-4,65 %	4,8-4,55 %	4,7-4,45 %	4,6-4,35 %	4,6-4,35 %
4	Angka Pertumbuhan Ekonomi	-1.69	3,48-4,0	3,7-4,3	4,0-4,6	4,3-4,9	4,6-5,2	4,9-5,5	4,9-5,5
5	Persentase Penduduk Miskin	15.44	15,05-14,20 %	14,6-13,3 %	14,2-12,9 %	13,2-11,9 %	12,5-11,2 %	12,1-10,8 %	12,1-10,8 %
6	Indeks Gini	0.313	0,313-0,311	0,311-0,309	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301	0,303-0,301
7	Indeks Reformasi Birokrasi	68.94	69,70-70,10	72,50-73,95	74,75-76,20	76,40-77,85	77,55-79,00	78,95-80,40	78,95-80,40
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	NA	58,62-60	60-65	65-68	68-70	70-72	72-74	72-74
9	Indeks Risiko Bencana	119.98	119,71-119,50	119,34-119,11	118,84-117,84	116,98-115,98	115,11-114,11	113,24-112,24	113,24-112,24
10	Indeks Kesalehan Sosial	NA	72,1-74,5	73,1-75,8	76,8-78,5	77,8-81,2	80,5-82,9	81,8-83,7	81,8-83,7

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.54	70,75-71,14	70,89-71,39	71,39-71,89	71,89-72,39	72,39-72,89	72,89-73,39	72,89-73,39	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Kearsifan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja
2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	-1.69	3,48-4,0	3,7-4,3	4,0-4,6	4,3-4,9	4,6-5,2	4,9-5,5	4,9-5,5	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Indeks Gini	0.313	0,313-0,311	0,311-0,309	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301	0,303-0,301	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase Penduduk Miskin	15.44%	15,05-14,20 %	14,6-13,3 %	14,2-12,9 %	13,2-11,9 %	12,5-11,2 %	12,1-10,8 %	12,1-10,8 %	Pangan, Sosial
5	Indeks Reformasi Birokrasi	68.94	69,70-70,10	72,50-73,95	74,75-76,20	76,40-77,85	77,55-79,00	78,95-80,40	78,95-80,40	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Inspektorat Daerah, keuangan, Kepegawaian, Komunikasi dan Informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat DPRD, Penanaman Modal, Kecamatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Uraian
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	NA	58,62-60	60-65	65-68	68-70	70-72	72-74	72-74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
7	Indeks Risiko Bencana	119,98	119,71-119,90	119,34-119,11	118,84-117,84	116,96-115,96	115,11-114,11	113,24-112,24	113,24-112,24	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan), Lingkungan Hidup
8	Indeks Kesalehan Sosial	NA	72,1-74,5	75,1-76,5	76,8-78,5	77,8-81,2	80,5-82,9	81,8-83,7	81,8-83,7	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kebudayaan
9	Indeks Pendidikan	9,88	9,91	9,94-9,96	9,97-9,99	10,00-10,02	10,03-10,05	10,06-10,08	10,06-10,08	Pendidikan
10	Indeks Kesehatan	72,3	72,3	72,90-73,00	73,01-73,20	73,30-73,40	73,50-73,60	73,70-73,80	73,70-73,80	Kesehatan
11	Indeks Pembangunan Infrastruktur	NA	63-66	66-69	69-72	72-75	75-78	78-81	78-81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
12	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	9.88%	5.08%	12.40%	11.74%	17.41%	12.04%	25.02%	25.02%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	70.51%	70.62%	72.83%	73.65%	74.50%	75.38%	76.30%	76.30%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	9.30%	11.63%	20.00%	30.23%	37.21%	44.19%	48.84%	48.84%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Persentase kososulan pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW	8.40%	10.00%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase permukiman yang sehat dan aman	69%	72%	73.2%	74.5%	75.9%	76.9%	77.8%	77.8%	Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Kelindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Pol PP)

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
18	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,38 (Rendah)	0,40 (Sedang)	0,42 (Sedang)	0,44 (Sedang)	0,46 (Sedang)	0,48 (Sedang)	0,50 (Sedang)	0,50 (Sedang)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
19	Persentase PPKS yang mandiri	0.25%	0.25%	0.50%	1%	1.50%	2%	2.50%	2.50%	Sosial
20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.44%	5,3-5,1 %	5,05-4,8 %	4,9-4,65 %	4,8-4,55 %	4,7-4,45 %	4,6-4,35 %	4,6-4,35 %	Tenaga Kerja
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.41%	73.29%	73.89%	74.51%	75.13%	75.76%	75.85%	75.85%	Tenaga Kerja
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.19	92,25-92,40	92,55-92,85	92,85-93,05	93,05-93,15	93,15-93,25	93,25-93,50	93,25-93,50	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	22.669,82	22.669,82-23.946,14	24.070,82-25.445,16	25.685,97-27.177,98	27.522,52-29.145,66	29.603,22-31.372,39	30.683,92-32.599,12	30.683,92-32.599,12	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian
24	Indeks Ketahanan Pangan	NA	71	73	75	77	79	81	81	Pangan
25	Cakupan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam kurun waktu tertentu	63%	64%	65%	67%	69%	71%	72%	72%	Pertanahan
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.01	69.50	65.75	65.80	65.85	65.90	65.95	65.95	Lingkungan Hidup
27	Indeks Pelayanan Publik	NA	3.75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90	5,50-5,90	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Sekretariat DPRD, Kecamatan
28	Rata-rata Persentase capaian adminduk	65.30%	66.00%	68%	77%	87%	91%	96%	96%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Persentase pemanfaatan data kependudukan	43%	45%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri)	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.80	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan	697 : 370.157	900 : 396.423	936 : 396.423	971 : 422.688	1.007 : 448.953	1.042 : 475.219	1.077 : 501.483	1.077 : 501.483	Perhubungan
33	Indeks SPBE	2.98	3	3	3.5	4	4.5	5	5	Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
34	Persentase kenaikan omzet usaha mikro	5.60%	6.10%	6.30%	6.50%	6.70%	6.90%	7.10%	7.10%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
35	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	209 M	213 M	500 M	600 M	800 M	1,1 Trilyun	1,7 Trilyun	1,7 Trilyun	Penanaman Modal
36	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	25%	25%	25%	30%	35%	40%	50%	50%	Kepemudaan dan Olahraga
37	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Statistik
38	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Persandian
39	Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan	12%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	22%	Kebudayaan
40	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	50.15	50.25	50.35	50.45	50.50	50.55	50.55	Perpustakaan
41	Indeks Kearsipan	45.36	46.00	48.00	50.00	53.00	56.00	60.00	60.00	Kearsipan
42	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	154,059.39	160,221.77	166,630.64	173,295.87	180,227.70	187,436.81	194,934.28	194,934.28	Kelautan dan Perikanan
43	Angka Kunjungan Wisata	331,037	468,077	1,092,300	1,201,503	1,321,565	1,453,821	1,599,203	1,599,203	Pariwisata
44	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)	6,132,583.1	6,254,621.5	6,376,659.9	6,630,450.9	6,894,342.9	7,168,737.7	7,454,053.5	7,454,053.5	Pertanian
45	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)	962,841.8	982,545.0	1,002,248.1	1,035,843.2	1,068,794.9	1,117,079.5	1,165,662.2	1,165,662.2	Pertanian
46	PDRB Sektor Perdagangan	2,524,750,000	2,650,000,000	2,549,749,025	2,574,987,501	2,600,479,877	2,626,224,628	2,652,224,252	2,652,224,252	Perdagangan
47	PDRB Sektor Industri	1,161,385,000	1,200,000,000	1,172,882,712	1,184,494,250	1,196,220,743	1,208,063,329	1,220,023,156	1,220,023,156	Perindustrian
48	Persentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi	75%	75%	78%	81%	84%	87%	90%	90%	Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
49	Nilai LHE AKIP	81,23 (A)	81,70 (A)	82,25 (A)	82,75 (A)	83,05 (A)	83,3 (A)	84 (A)	84 (A)	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Inspektorat Daerah
50	Persentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
51	Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
52	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
53	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD	90.72%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Sekretariat DPRD
54	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	Baik (78)	Baik (80)	Baik (82)	Baik (85)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Perencanaan
55	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	79	79	79.12	79.22	79.32	79.42	79.42	Keuangan
56	Indeks Profesionalitas ASN	50	50	51	52	53	54	55	55	Kepegawaian
57	Persentase ASN mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi	2%	1%	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.4%	Pendidikan dan Pelatihan
58	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Digunakan Sebagai pengambilan kebijakan pimpinan/policy brief	80%	82%	83%	85%	87%	90%	93%	93%	Penelitian dan Pengembangan
59	Maturitas SPIP	2	3	3	3.2	3.5	3.7	4	4	Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
60	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	Kecamatan Jogorogo
61	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81.00	82.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Jogorogo
62	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	100%	100%	100%	Kecamatan Peron
63	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.80	80.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Peron
64	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	92.94%	92.94%	70.69%	82.35%	88.24%	94.11%	100%	100%	Kecamatan Karangjati
65	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.80	80.00	79.82	79.90	79.92	79.94	79.96	79.96	Kecamatan Karangjati
66	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Padas
67	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81.00	82.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Padas
68	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	30.77%	38.46%	38.46%	46.15%	61.54%	69.23%	84.62%	84.62%	Kecamatan Geneng
69	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78.51	76.75	78.77	79.50	80.52	80.87	81.69	81.69	Kecamatan Geneng
70	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	35.71%	42.86%	42.86%	50%	51.14%	64.28%	71.42%	71.42%	Kecamatan Kwedungan
71	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.26	80.25	80.25	81.50	82.75	83.80	84.80	84.80	Kecamatan Kwedungan
72	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	70%	71%	71%	86%	86%	100%	100%	100%	Kecamatan Mantingan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
73	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75.62	75.62	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00	Kecamatan Mantingan
74	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	44%	89%	56%	67%	78%	89%	89%	89%	Kecamatan Pangkur
75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.13	90.00	79.25	79.50	79.75	80.00	80.25	80.25	Kecamatan Pangkur
76	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	58%	90%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Kecamatan Brangin
77	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	67.00	60.00	77.00	77.50	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Brangin
78	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Kecamatan Pitu
79	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76.66	76.66	77.10	77.25	78.25	79.25	80.25	80.25	Kecamatan Pitu
80	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	83%	92%	67%	67%	75%	83%	92%	92%	Kecamatan Widodaren
81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77.70	77.80	62.50	62.50	75.00	75.00	87.50	87.50	Kecamatan Widodaren
82	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Kasreman
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.00	77.00	77.50	78.00	78.50	79.00	79.50	79.50	Kecamatan Kasreman
84	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	71.43%	70.95%	71.43%	85.71%	85.71%	100%	100%	100%	Kecamatan Ngrambe
85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76.36	68.77	77.50	77.75	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Ngrambe

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
86	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	40%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	80%	Kecamatan Gerih
87	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75.52	75.75	75.79	75.83	75.87	75.95	76	76	Kecamatan Gerih
88	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	66.67%	73.00%	80.00%	86.67%	93.33%	93.33%	100%	100%	Kecamatan Sine
89	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77.88	79.88	77.80	78.35	78.80	79.28	79.58	79.58	Kecamatan Sine
90	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	70.00%	76.00%	88.00%	88.00%	88.00%	100%	100%	100%	Kecamatan Kendal
91	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75.89	76.00	77.50	77.75	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Kendal
92	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	50.00%	58.33%	68.33%	75.00%	82.33%	91.67%	100%	100%	Kecamatan Kedunggalar
93	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77.26	78.38	77.50	77.85	79.00	79.25	79.50	79.50	Kecamatan Kedunggalar
94	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	71.43%	71.43%	71.43%	85.71%	85.71%	100%	100%	100%	Kecamatan Karanganyar
95	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.41	77.00	77.50	78.00	78.50	79.00	79.50	79.50	Kecamatan Karanganyar
96	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	92.67%	83.00%	92.67%	92.67%	92.67%	100%	100%	100%	Kecamatan Ngawi
97	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.15	78.32	80.50	80.55	80.60	80.65	80.70	80.70	Kecamatan Ngawi
98	Angka Konflik	0	0	0	0	0	0	0	0	Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOT KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.54	70,75-71,14	70,89-71,39	71,39-71,89	71,89-72,39	72,39-72,89	72,89-73,39	72,89-73,39	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja
2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	-1.69	3,48-4,0	3,7-4,3	4,0-4,6	4,3-4,9	4,6-5,2	4,9-5,5	4,9-5,5	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Indeks Gini	0.313	0,313-0,311	0,311-0,309	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301	0,303-0,301	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase Penduduk Miskin	15.44%	15,05-14,20 %	14,6-13,3 %	14,2-12,9 %	13,2-11,9 %	12,5-11,2 %	12,1-10,8 %	12,1-10,8 %	Pangan, Sosial
5	Indeks Reformasi Birokrasi	68.94	69,70-70,10	72,50-73,95	74,75-76,20	76,40-77,85	77,55-79,00	78,95-80,40	78,95-80,40	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Inspektorat Daerah, keuangan, Kepegawaian, Komunikasi dan Informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat DPRD, Penanaman Modal, Kecamatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	NA	58,62-60	60-65	65-68	68-70	70-72	72-74	72-74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
7	Indeks Risiko Bencana	119,98	119,71-119,50	119,34-119,11	118,84-117,84	116,98-115,98	115,11-114,11	113,24-112,24	113,24-112,24	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan), Lingkungan Hidup
8	Indeks Kesalehan Sosial	NA	72,1-74,8	73,1-75,8	76,8-78,5	77,8-81,2	80,5-82,9	81,8-83,7	81,8-83,7	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kebudayaan
9	Indeks Pendidikan	9,88	8,91	9,84-9,96	9,87-9,99	10,00-10,02	10,03-10,05	10,06-10,08	10,06-10,08	Pendidikan
10	Indeks Kesehatan	72,3	72,3	72,90-73,00	73,01-73,20	73,30-73,40	73,50-73,60	73,70-73,80	73,70-73,80	Kesehatan
11	Indeks Pembangunan Infrastruktur	NA	63-66	66-69	69-72	72-75	75-78	78-81	78-81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
12	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	9.88%	5.08%	12.40%	11.74%	17.41%	12.04%	25.02%	25.02%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	70.51%	70.62%	72.83%	73.65%	74.50%	75.38%	76.30%	76.30%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	9.30%	11.63%	20.00%	30.23%	37.21%	44.19%	48.84%	48.84%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTAW	8.40%	10.00%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase permukiman yang sehat dan aman	69%	72%	73.2%	74.5%	75.9%	76.9%	77.8%	77.8%	Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Pol PP)

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
18	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,38 (Rendah)	0,40 (Sedang)	0,42 (Sedang)	0,44 (Sedang)	0,46 (Sedang)	0,48 (Sedang)	0,50 (Sedang)	0,50 (Sedang)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
19	Persentase PPKS yang mandiri	0.25%	0.25%	0.50%	1%	1.50%	2%	2.50%	2.50%	Sosial
20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.44%	5,3-5,1 %	5,05-4,8 %	4,9-4,65 %	4,8-4,55 %	4,7-4,45 %	4,6-4,35 %	4,6-4,35 %	Tenaga Kerja
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.41%	73.29%	73.89%	74.51%	75.13%	75.76%	75.85%	75.85%	Tenaga Kerja
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.19	92,25-92,40	92,55-92,85	92,85-93,05	93,05-93,15	93,15-93,25	93,25-93,50	93,25-93,50	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	22.669,82	22.669,82-23.946,14	24.070,82-25.445,16	25.685,97-27.177,98	27.522,52-29.145,66	29.603,22-31.372,39	30.683,92-32.599,12	30.683,92-32.599,12	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian
24	Indeks Ketahanan Pangan	NA	71	73	75	77	79	81	81	Pangan
25	Cakupan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam kurun waktu tertentu	63%	64%	65%	67%	69%	71%	72%	72%	Pertanahan
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.01	69.50	65.75	65.80	65.85	65.90	65.95	65.95	Lingkungan Hidup
27	Indeks Pelayanan Publik	NA	3.75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90	5,50-5,90	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Sekretariat DPRD, Kecamatan
28	Rata-rata Persentase capaian adminduk	65.30%	66.00%	68%	77%	87%	91%	96%	96%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Persentase pemanfaatan data kependudukan	43%	45%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri)	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.80	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan	697 : 370.157	900 : 396.423	936 : 396.423	971 : 422.688	1.007 : 448.953	1.042 : 475.219	1.077 : 501.483	1.077 : 501.483	Perhubungan
33	Indeks SPBE	2.98	3	3	3.5	4	4.5	5	5	Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
34	Persentase kenaikan omzet usaha mikro	5.60%	6.10%	6.30%	6.50%	6.70%	6.90%	7.10%	7.10%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
35	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	209 M	213 M	500 M	600 M	800 M	1,1 Trilyun	1,7 Trilyun	1,7 Triliun	Penanaman Modal
36	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	25%	25%	25%	30%	35%	40%	50%	50%	Kepemudaan dan Olahraga
37	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Statistik
38	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Persandian
39	Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan	12%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	22%	Kebudayaan
40	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	50.15	50.25	50.35	50.45	50.50	50.55	50.55	Perpustakaan
41	Indeks Kearsipan	45.36	46.00	48.00	50.00	53.00	56.00	60.00	60.00	Kearsipan
42	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	154,059.39	160,221.77	166,630.64	173,295.87	180,227.70	187,436.81	194,934.28	194,934.28	Kelautan dan Perikanan
43	Angka Kunjungan Wisata	331,037	468,077	1,092,300	1,201,503	1,321,565	1,453,821	1,599,203	1,599,203	Pariwisata
44	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)	6,132,583.1	6,254,621.5	6,376,659.9	6,630,450.9	6,894,342.9	7,168,737.7	7,454,053.5	7,454,053.5	Pertanian
45	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)	962,841.8	982,545.0	1,002,248.1	1,035,843.2	1,068,794.9	1,117,079.5	1,165,662.2	1,165,662.2	Pertanian
46	PDRB Sektor Perdagangan	2,524,750,000	2,650,000,000	2,549,749,025	2,574,987,501	2,600,479,877	2,626,224,628	2,652,224,252	2,652,224,252	Perdagangan
47	PDRB Sektor Industri	1,161,385,000	1,200,000,000	1,172,882,712	1,184,494,250	1,196,220,743	1,208,063,329	1,220,023,156	1,220,023,156	Perindustrian
48	Persentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi	75%	75%	78%	81%	84%	87%	90%	90%	Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
49	Nilai LHE AKIP	81,23 (A)	81,70 (A)	82,25 (A)	82,75 (A)	83,05 (A)	83,3 (A)	84 (A)	84 (A)	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Inspektorat Daerah
50	Persentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
51	Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
52	Persentase kebijakan strategis bidang Perencanaan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
53	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD	90.72%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Sekretariat DPRD
54	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	Baik (78)	Baik (80)	Baik (82)	Baik (85)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Perencanaan
55	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	79	79	79.12	79.22	79.32	79.42	79.42	Keuangan
56	Indeks Profesionalitas ASN	50	50	51	52	53	54	55	55	Kepegawalan
57	Persentase ASN mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi	2%	1%	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.4%	Pendidikan dan Pelatihan
58	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Digunakan Sebagai pengambilan kebijakan pimpinan/policy brief	80%	82%	83%	85%	87%	90%	93%	93%	Penelitian dan Pengembangan
59	Maturitas SPIP	2	3	3	3.2	3.5	3.7	4	4	Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
60	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Jogorogo
61	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81.00	82.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Jogorogo
62	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	100%	100%	100%	Kecamatan Paron
63	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.60	80.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Paron
64	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	92.94%	92.94%	70.58%	82.35%	83.24%	94.12%	100%	100%	Kecamatan Karanglati
65	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.80	80.00	79.82	79.90	79.92	79.94	79.96	79.96	Kecamatan Karanglati
66	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Padas
67	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81.00	82.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Padas
68	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	30.77%	38.46%	38.46%	46.15%	61.54%	69.23%	84.62%	84.62%	Kecamatan Geneng
69	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78.51	76.75	78.77	79.50	80.52	80.87	81.69	81.69	Kecamatan Geneng
70	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	35.71%	42.86%	42.86%	50%	51.14%	64.28%	71.42%	71.42%	Kecamatan Kwedungan
71	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.26	80.25	80.25	81.50	82.75	83.80	84.80	84.80	Kecamatan Kwedungan
72	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	70%	71%	71%	86%	86%	100%	100%	100%	Kecamatan Mantingan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
73	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75.62	75.62	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00	Kecamatan Mantingan
74	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	44%	89%	56%	67%	78%	89%	89%	89%	Kecamatan Pangkur
75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.13	90.00	79.25	79.50	79.75	80.00	80.25	80.25	Kecamatan Pangkur
76	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Kecamatan Bringin
77	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	67.00	60.00	77.00	77.50	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Bringin
78	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Kecamatan Pitu
79	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76.66	76.66	77.10	77.25	78.25	79.25	80.25	80.25	Kecamatan Pitu
80	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	83%	92%	67%	67%	75%	83%	92%	92%	Kecamatan Widodaren
81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77.70	77.80	62.50	62.50	75.00	75.00	87.50	87.50	Kecamatan Widodaren
82	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Kasremen
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.00	77.00	77.50	78.00	78.50	79.00	79.50	79.50	Kecamatan Kasremen
84	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	71.43%	70.95%	71.43%	85.71%	85.71%	100%	100%	100%	Kecamatan Ngrambe
85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76.36	68.77	77.50	77.75	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Ngrambe

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021-2026

**INDIKATOT KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.54	70,75-71,14	70,89-71,39	71,39-71,89	71,89-72,39	72,39-72,89	72,89-73,39	72,89-73,39	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja
2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	-1.69	3,48-4,0	3,7-4,3	4,0-4,6	4,3-4,9	4,6-5,2	4,9-5,5	4,9-5,5	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Indeks Gini	0.313	0,313-0,311	0,311-0,309	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301	0,303-0,301	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase Penduduk Miskin	15.44%	15,05-14,20 %	14,6-13,3 %	14,2-12,9 %	13,2-11,9 %	12,5-11,2 %	12,1-10,8 %	12,1-10,8 %	Pangan, Sosial
5	Indeks Reformasi Birokrasi	68.94	69,70-70,10	72,50-73,95	74,75-76,20	76,40-77,85	77,55-79,00	78,95-80,40	78,95-80,40	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Inspektorat Daerah, keuangan, Kepegawaian, Komunikasi dan Informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat DPRD, Penanaman Modal, Kecamatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Uraian
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	NA	58,62-60	60-65	65-68	68-70	70-72	72-74	72-74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
7	Indeks Risiko Bencana	119,98	119,71-119,50	119,34-119,11	118,84-117,84	116,98-115,98	115,11-114,11	113,24-112,24	113,24-112,24	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan), Lingkungan Hidup
8	Indeks Kesalehan Sosial	NA	72,1-74,5	73,1-78,8	76,8-78,8	77,8-81,1	80,5-82,8	81,8-83,7	81,8-83,7	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kebudayaan
9	Indeks Pendidikan	9,88	9,91	9,94-9,96	9,97-9,99	10,00-10,02	10,03-10,05	10,06-10,08	10,06-10,08	Pendidikan
10	Indeks Kesehatan	72,3	72,3	72,90-73,00	73,01-73,10	73,30-73,40	73,50-73,60	73,70-73,80	73,70-73,80	Kesehatan
11	Indeks Pembangunan Infrastruktur	NA	63-66	66-69	69-72	72-75	75-78	78-81	78-81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
12	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	9,88%	5,08%	12,40%	11,74%	17,41%	12,04%	25,02%	25,02%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,51%	70,62%	72,83%	73,65%	74,50%	75,38%	76,30%	76,30%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	9,30%	11,63%	20,00%	30,23%	37,21%	44,19%	48,84%	48,84%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW	8,40%	10,00%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase permukiman yang sehat dan aman	69%	72%	73,2%	74,5%	75,9%	76,9%	77,8%	77,8%	Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Pol PP)

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
18	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,38 (Rendah)	0,40 (Sedang)	0,42 (Sedang)	0,44 (Sedang)	0,46 (Sedang)	0,48 (Sedang)	0,50 (Sedang)	0,50 (Sedang)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
19	Persentase PPKS yang mandiri	0.25%	0.25%	0.50%	1%	1.50%	2%	2.50%	2.50%	Sosial
20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.44%	5,3-5,1 %	5,05-4,8 %	4,9-4,65 %	4,8-4,55 %	4,7-4,45 %	4,6-4,35 %	4,6-4,35 %	Tenaga Kerja
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.41%	73.29%	73.89%	74.51%	75.13%	75.76%	75.85%	75.85%	Tenaga Kerja
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.19	92,25-92,40	92,55-92,85	92,85-93,05	93,05-93,15	93,15-93,25	93,25-93,50	93,25-93,50	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	22,669.82	22.669,82-23.946,14	24.070,82-25.445,16	25.685,97-27.177,98	27.522,52-29.145,66	29.603,22-31.372,39	30.683,92-32.599,12	30.683,92-32.599,12	Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian
24	Indeks Ketahanan Pangan	NA	71	73	75	77	79	81	81	Pangan
25	Cakupan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam kurun waktu tertentu	63%	64%	65%	67%	69%	71%	72%	72%	Pertanahan
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.01	69.50	65.75	65.80	65.85	65.90	65.95	65.95	Lingkungan Hidup
27	Indeks Pelayanan Publik	NA	3.75	3,86-4,26	4,27-4,67	4,68-5,08	5,09-5,49	5,50-5,90	5,50-5,90	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Sekretariat DPRD, Kecamatan
28	Rata-rata Persentase capaian adminduk	65.30%	66.00%	68%	77%	87%	91%	96%	96%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Persentase pemanfaatan data kependudukan	43%	45%	60%	70%	80%	85%	90%	90%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri)	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.80	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan	697 : 370.157	900 : 396.423	936 : 396.423	971 : 422.688	1.007 : 448.953	1.042 : 475.219	1.077 : 501.483	1.077 : 501.483	Perhubungan
33	Indeks SPBE	2.98	3	3	3.5	4	4.5	5	5	Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
34	Persentase kenaikan omzet usaha mikro	5.60%	6.10%	6.30%	6.50%	6.70%	6.90%	7.10%	7.10%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
35	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	209 M	213 M	500 M	600 M	800 M	1,1 Trilyun	1,7 Trilyun	1,7 Triliun	Penanaman Modal
36	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	25%	25%	25%	30%	35%	40%	50%	50%	Kepemudaan dan Olahraga
37	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Statistik
38	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Persandian
39	Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan	12%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	22%	Kebudayaan
40	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	50.15	50.25	50.35	50.45	50,50	50.55	50.55	Perpustakaan
41	Indeks Kearsipan	45.36	46.00	48.00	50.00	53.00	56.00	60.00	60.00	Kearsipan
42	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	154,059.39	160,221.77	166,630.64	173,295.87	180,227.70	187,436.81	194,934.28	194,934.28	Kelautan dan Perikanan
43	Angka Kunjungan Wisata	331,037	468,077	1,092,300	1,201,503	1,321,565	1,453,821	1,599,203	1,599,203	Pariwisata
44	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)	6,132,583.1	6,254,621.5	6,376,659.9	6,630,450.9	6,894,342.9	7,168,737.7	7,454,053.5	7,454,053.5	Pertanian
45	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)	962,841.8	982,545.0	1,002,248.1	1,035,843.2	1,068,794.9	1,117,079.5	1,165,662.2	1,165,662.2	Pertanian
46	PDRB Sektor Perdagangan	2,524,750,000	2,650,000,000	2,549,749,025	2,574,987,501	2,600,479,877	2,626,224,628	2,652,224,252	2,652,224,252	Perdagangan
47	PDRB Sektor Industri	1,161,385,000	1,200,000,000	1,172,882,712	1,184,494,250	1,196,220,743	1,208,063,329	1,220,023,156	1,220,023,156	Perindustrian
48	Persentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi	75%	75%	78%	81%	84%	87%	90%	90%	Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
49	Nilai LHE AKIP	81,23 (A)	81,70 (A)	82,25 (A)	82,75 (A)	83,05 (A)	83,3 (A)	84 (A)	84 (A)	Sekretariat Daerah, Perencanaan, Inspektorat Daerah
50	Persentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
51	Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
52	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
53	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD	90.72%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Sekretariat DPRD
54	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	Baik (78)	Baik (80)	Baik (82)	Baik (85)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)	Perencanaan
55	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	79	79	79.12	79.22	79.32	79.42	79.42	Keuangan
56	Indeks Profesionalitas ASN	50	50	51	52	53	54	55	55	Kepegawaian
57	Persentase ASN mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi	2%	1%	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.4%	Pendidikan dan Pelatihan
58	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Digunakan Sebagai pengambilan kebijakan pimpinan/policy brief	80%	82%	83%	85%	87%	90%	93%	93%	Penelitian dan Pengembangan
59	Maturitas SPIP	2	3	3	3.2	3.5	3.7	4	4	Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
60	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Jogorogo
61	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81.00	82.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Jogorogo
62	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	100%	100%	100%	Kecamatan Paron
63	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.00	80.00	80.10	80.15	80.20	80.15	80.50	80.50	Kecamatan Paron
64	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	82.94%	82.94%	70.59%	81.85%	88.24%	94.12%	100%	100%	Kecamatan Karangjati
65	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.80	80.00	79.82	79.90	79.92	79.94	79.96	79.96	Kecamatan Karangjati
66	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Padas
67	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81.00	82.00	80.10	80.15	80.20	80.25	80.50	80.50	Kecamatan Padas
68	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	30.77%	38.46%	38.46%	46.15%	61.54%	69.23%	84.62%	84.62%	Kecamatan Geneng
69	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78.51	76.75	78.77	79.50	80.52	80.87	81.69	81.69	Kecamatan Geneng
70	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	35.71%	42.86%	42.86%	50%	51.14%	64.28%	71.42%	71.42%	Kecamatan Kwadungan
71	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.26	80.25	80.25	81.50	82.75	83.80	84.80	84.80	Kecamatan Kwadungan
72	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	70%	71%	71%	86%	86%	100%	100%	100%	Kecamatan Mantingan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
73	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75.62	75.62	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00	Kecamatan Mantingan
74	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	44%	89%	56%	67%	78%	89%	89%	89%	Kecamatan Pangkur
75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.13	90.00	79.25	79.50	79.75	80.00	80.25	80.25	Kecamatan Pangkur
76	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Kecamatan Bringin
77	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87.00	80.00	77.50	77.50	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Bringin
78	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Kecamatan Pitu
79	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76.66	76.66	77.10	77.25	78.25	79.25	80.25	80.25	Kecamatan Pitu
80	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	83%	92%	67%	67%	75%	83%	92%	92%	Kecamatan Widodaren
81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77.70	77.80	82.50	82.50	75.00	75.00	87.50	87.50	Kecamatan Widodaren
82	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	91.66%	100%	100%	100%	Kecamatan Kasreman
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.00	77.00	77.50	78.00	78.50	79.00	79.50	79.50	Kecamatan Kasreman
84	Persentase Desa/Kelurahan dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori Memuaskan	71.43%	70.95%	71.43%	85.71%	85.71%	100%	100%	100%	Kecamatan Ngrambe
85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76.36	68.77	77.50	77.75	78.00	78.25	78.50	78.50	Kecamatan Ngrambe

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 170 TAHUN 2021
TETANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

ARSITEKTUR KINERJA
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN NGAWI

VISI

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

MISI

KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026



1

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat

2

Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi

3

Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

4

Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan

5

Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

REKONSTRUKSI PENCAPAIAN VISI

SEMESTA BERENCANA

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

Mandiri dan Berakhlak

MISI 1

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat

Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan

Misi 2

Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi

Gotong Royong

MISI 5

Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

MISI 4

Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan

MISI 3

Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

REKONSTRUKSI PENCAPAIAN VISI

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Mandiri dan
berakhlak

Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

Pembangunan
Gender

Makmur dan
Berdaya Saing

Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi

Penurunan kemiskinan

Penurunan
Ketimpangan
Pendapatan

Penurunan Tingkat
Pengangguran

Gotong Royong

Peningkatan
Kondusifitas Daerah

Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur
berkelanjutan

Kualitas Lingkungan
Hidup yang Sehat &
Tangguh Bencana

Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan dan
pelayanan publik



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS LEVEL 0

Pemerintah Kabupaten Ngawi

Manajemen



Tata Kelola Pemerintahan

Utama



Pembangunan Manusia

- Kualitas Pendidikan
- Kualitas Kesehatan
- Tingkat Daya Beli
- Pembangunan Gender



Kesejahteraan Sosial Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Kemiskinan
- Ketimpangan Pendapatan
- Kesempatan Kerja

Pendukung



Kondusifitas Daerah

- Ketenteraman & Ketertiban Umum
- Kesatuan bangsa
- Budaya & Kearifan Lokal



Kualitas Infrastruktur & LH

- Infrastruktur Dasar
- Lingkungan Hidup Sehat & Tangguh Bencana

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 1

(MANDIRI & BERAKHLAQ)

PROSES 1

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama



Peningkatan
Kualitas
Pendidikan



Peningkatan
Kualitas
Kesehatan



Peningkatan
Daya Beli
Masyarakat

Pendukung

Peningkatan
Kualitas
Infrastruktur

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Pemberdayaan
Pemuda

Pengembangan
Teknologi dan
Informasi

Kinerja Utama 1
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 1



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
IPM	70,75-71,14	70,89-71,39	71,39-71,89	71,89-72,39	72,39-72,89	72,89-73,39

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
1.	Peningkatan Kualitas SDM	Kualitas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kualitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Daya Beli	Disdagperintaker, Dinkop UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
		Pemberdayaan Pemuda	Disparpora
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AKB
		Pengembangan Teknologi dan Informasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 1

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia

PROSES UTAMA

KUALITAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

Sasaran :
Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan
Indikator :
Indeks Pendidikan

Indikator Program :
1. APM dan APK SD dan SMP
2. Angka Kelulusan SD dan SMP
3. Angka Melanjutkan SD dan SMP
4. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi minimal S1/D4

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Pengelolaan Pendidikan PAUD, SD, SMP, & Pendidikan Non Formal yang terpenuhi
2. Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar yg terpenuhi
3. Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KUALITAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Sasaran :
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Indikator :
- Indeks Keluarga Pra Sehat
- Cakupan Desa Siaga Aktif

Indikator Program :
1. Persentase SDM Kesehatan yang mempunyai profesi sesuai kompetensinya
2. Persentase Faskes dengan sarana prasarana dan manajemen sesuai standart
3. Cakupan PHBS

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah Nakes yang memenuhi Kompetensi
2. Jumlah Faskes yang memenuhi standar
3. Cakupan Pembinaan desa siaga aktif

PENINGKATAN DAYA BELI

DINKOP UKM

Indikator Program :
Jumlah UM yang mengalami kenaikan omset

Indikator Kegiatan :
1. Persentase UM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
2. Jumlah UM yang mengalami Perkembangan produk

DPPTK

Indikator Program :
Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok

Indikator Kegiatan :
Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dioptimalkan budidayanya
2. Jumlah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang meningkat nilai tambahnya secara ekonomi

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Indikator Kegiatan :
Jumlah hasil Pengolahan dan pemasaran Perikanan dan Peternakan

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

DINAS PUPR

Indikator Program :
Persentase Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Indikator Kegiatan :
Persentase jalan yang dibangun

DINAS PRKP

Indikator Kegiatan :
1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman
2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah aman

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO

Indikator Kegiatan :
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

PEMBERDAYAAN PEMUDA

DISPARPORA

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi Mandiri
2. Persentase organisasi pemuda yang aktif

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DP3AKB

Indikator Kegiatan :
1. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah dan swasta
2. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
3. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

PROSES PENDUKUNG



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 2

PROSES 2 (MANDIRI & BERAKHLAQ)

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Peningkatan
pemberdayaan &
Kesetaraan
perempuan

Perlindungan
Perempuan,
Anak, Lansia &
Disabilitas

Peningkatan
Fasum & Fasos
yg responsif
Gender

Pendukung

Pemenuhan Hak Dasar Bagi Perempuan,
Anak, Lansia & Disabilitas

Kinerja Utama 2
Pembangunan Gender



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 2

Peningkatan
pemberdayaan &
Kesetaraan Gender

Pembangunan
Gender

Perlindungan
Perempuan, Anak,
Lansia & Disabilitas

Peningkatan Fasum
& Fasos yg responsif
Gender

Pemenuhan Hak
Dasar Bagi
Perempuan, Anak,
Lansia &
Disabilitas

Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
IPG	92,25 - 92,40	92,55 - 92,85	92,85 - 93,05	93,05 - 93,15	93,15 - 93,25	93,25 - 93,50

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
2.	Pembangunan Gender	Peningkatan pemberdayaan & Kesetaraan gender	DP3AKB, DPMD, Disdagnaker, Dinkop, Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian, Dinas Perikanan & Peternakan, 19 Kecamatan
		Peningkatan Fasum & Fasos yg responsif Gender	Dinas PRKP, Dinas PUPR, Pemerintah Desa
		Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia & Disabilitas	DP3AKB, Disdagnaker, Dinkop UKM, Dinsos
		Pemenuhan Hak Dasar Bagi Perempuan, Anak, Lansia & Disabilitas	Dinas Dikbud, Dinkes, Dispenduk Capil, Dinsos



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 2 PEMBANGUNAN GENDER Indikator : Indeks Pembangunan Gender

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kehidupan Bermasyarakat

DP3AKB

DPMDESA

Dinsos

Dinkop

Disperta

Disdagnaker

Disnakan

19 Kecamatan

Sasaran :

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Indikator :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Program :

1. Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
3. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang aktif

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
2. Persentase kelembagaan PUG yang aktif
3. Rasio KDRT
4. Persentase lembaga yang mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk meningkatkan kualitas keluarga

Indikator Kegiatan :
Persentase PKK aktif

Indikator Kegiatan :
Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas

Indikator Kegiatan :
Persentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan latihan perkoperasian

Indikator Kegiatan :
Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Pasar yang Ber SNI
2. Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktifitas
3. Jumlah Penempatan tenaga Kerja

Indikator Kegiatan :
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG

Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (Kabupaten Sehat, Kampung KB, APE)

PROSES UTAMA



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 2 PEMBANGUNAN GENDER

Indikator : Indeks Pembangunan Gender

PROSES UTAMA

Peningkatan Fasum & Fasos yg Responsif Gender

Dinas Perkim

PUPR

Pemerintah Desa

Sasaran :
Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan yang sehat dan aman
Indikator :
Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yang didukung PSU

Indikator Program :
Persentase permukiman yang dilengkapi PSU

Indikator Kegiatan :
Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Indikator Kegiatan :
Persentase bangunan dan fasilitas umum dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi

Support pendanaan dari DD dan ADD

Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia & Disabilitas

DP3AKB

DISDAGNAKER

DINKOP

DINSOS

Sasaran :
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Indikator :
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Program :
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Indikator Kegiatan :
Rasio KDRT

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah Promosi dan Misi dagang bagi Produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
2. Jumlah Peserta yang menindak lanjuti pelatihan

Indikator Kegiatan :
Persentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan latihan perkoperasian

Indikator Kegiatan :
Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial



LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 2

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Indikator : Indeks Pembangunan Gender

Pemenuhan Hak Dasar Bagi Perempuan, Anak, Lansia & Disabilitas

DINKES

Sasaran :
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan

Indikator :
Indeks Keluarga Pra Sehat

DINDIK

DISPENDUK

DINSOS

Indikator Program :
IKM terhadap layanan kesehatan

Indikator Kegiatan :
jumlah masyarakat yang mendapatkan sarana promosi/sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpenuhi
2. Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang terpenuhi
3. Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terpenuhi

Indikator Kegiatan :
Persentase pemenuhan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Indikator Kegiatan :
Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas

PROSES
PENDUKUNG



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 3

(MAKMUR DAN BERDAYA SAING)

PROSES 3

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Peningkatan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan
Bursa Kerja

Peningkatan
Kualitas SDM

Penumbuhan
Wirausaha Baru

Peningkatan Investasi
dan Perijinan

Perlindungan
Tenaga Kerja

Pendukung

Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Informasi

Kinerja Utama 3
Penurunan Tingkat Pengangguran



CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 3



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
TPT	5,3 - 5,1 %	5,05 - 4,8 %	4,9 - 4,65 %	4,8 - 4,55 %	4,7 - 4,45 %	4,6 - 4,35 %

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
3.	Penurunan Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Disdagnaker
		Penumbuhan Wira Usaha Baru	Dinkop UKM, Disparpora,
		Perlindungan tenaga kerja	Disdagnaker, BPJSTK
		Peningkatan Investasi dan Perijinan	DPMPTSP
		Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Dlkbud, Disdagnaker, dinkop UKM, Disparpora
		Peningkatan Bursa Kerja	Disdagnaker
		Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Informasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 3

Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

PROSES UTAMA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penumbuhan Wira Usaha Baru			Peningkatan Bursa Kerja	Peningkatan Kualitas SDM				Perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan Investasi dan Perijinan	
DPPTK	Dinkop UKM	DISPARPORA	DPPTK	DPPTK	Dinas Pendidikan	DINKOP	DISPORA	DPPTK	DPPTK	BPJSTK	DPMTSP
Sasaran : - Meningkatnya Kesempatan kerja - Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Indikator : - Tingkat Kesempatan Kerja - Prosentase pekerja buruh yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	Sasaran: - Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wira Usaha Indikator: - Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan										Sasaran : - Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Indikator : - IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
<u>Indikator Program :</u> 1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 2. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 3. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	<u>Indikator Program :</u> 1. Persentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	<u>Indikator Program :</u> 1. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya 2. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kewirausahaan 3. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<u>Indikator Program :</u> Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	<u>Indikator Program :</u> Persentase kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	<u>Indikator Program :</u> 1. Persentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha			<u>Indikator program :</u> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<u>Indikator Program :</u> Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	<u>Indikator Program :</u> 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Data Base Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Up to Date	
<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 2. Jumlah Lembaga LPKS yang menindaklanjuti Pelatihan 3. Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktifitas 4. Jumlah calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan 2. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 3. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan 5. Persentase usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi akses pembiayaan	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Prosentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi penasarannya 2. Jumlah pendampingan kapasitas SDM pelaku UMKM yang dilaksanakan 3. Prosentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pendampingan omset	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Jumlah Penempatan tenaga Kerja 2. Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (Sisnaker)	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Persentase Penerimaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terpenuhi 2. Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terpenuhi	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan 2. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 3. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	<u>Indikator Kegiatan :</u> Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. (Sub : Jumlah peserta Pelatihan /sosialisasi peningkatan kepeloporan pemuda, Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kemandirian dan kepeloporan pemuda, Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan)	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Jumlah Peserta yang menindak lanjuti pelatihan 2. Jumlah Lembaga LPKS yang menindaklanjuti Pelatihan 3. Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktifitas	<u>Indikator Kegiatan :</u> Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 2. Persentase data base perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang tersedia dan Up Date Jumlah sarana dan prasarana informasi yang disediakan		



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 3

Tingkat Pengangguran Terbuka
Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

PROSES PENDUKUNG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO

Indikator Kegiatan :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 4

(MAKMUR & BERDAYA SAING)

PROSES 4

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Peningkatan
kualitas
Pembangunan
Desa

Peningkatan PDRB
Perkapita

Peningkatan
Omzet Usaha
Mikro

Peningkatan
Angka
Kunjungan
Wisata

Pendukung

Stabilitas Harga
dan Keamanan

Peningkatan
Kualitas
Infrastruktur

Pengembangan
Teknologi dan
Informasi

Peningkatan
Realisasi
Investasi

Kinerja Utama 4
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 4



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Angka Pertumbuhan Ekonomi	3,48 - 4,0	3,7 - 4,3	4,0 - 4,6	4,3 - 4,9	4,6 - 5,2	4,9 - 5,5

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
4.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Perkapita	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian, Disdagnaker, Dinkop UKM, Disparpora
		- Pertanian	
		- Perindustrian	
		- Perdagangan	
		Realisasi Investasi	DPMPTSP
		Presentase Kenaikan Omzet Usaha Mikro	Dinkop UKM
		Angka Kunjungan Wisata	Disparpora, DPMD
		Pengembangan Teknologi dan Informasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	DPMD, DPUPR, DPRKP, 19 Kecamatan
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur	DPUPR, Dinas PRKP, Dishub
		Stabilitas Harga dan Keamanan	Setda (Bagian Administrasi Perekonomian), Disdagnaker, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, Kesbangpol



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 4

PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi

PROSES UTAMA

PDRB Perkapita

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sasaran :

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah

Indikator :

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)

Indikator Program :

1. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung), Perkebunan, hortikultura

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah komoditas tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura yang meningkat nilai tambahnya secara ekonomi
2. Persentase pemanfaatan sarana produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
3. Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik
4. Jumlah BPP dan sarana pendukung dalam kondisi baik

DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN

Sasaran :

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Indikator :

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Indikator Program :

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap
3. Persentase peningkatan produktivitas peternakan

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang naik kelas
2. Persentase bantuan Sarana Prasarana Perikanan yang dimanfaatkan
3. Jumlah unit data penyakit hewan yang teridentifikasi
4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis

DPPTK

Sasaran :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri
- ###### Indikator :
- PDRB Sektor Perdagangan
 - PDRB Sektor Industri

Indikator Program :

1. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
3. Jumlah Industri Baru

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Pengelola sarana prasarana perdagangan yang mengikuti pembinaan
2. Jumlah Penempatan tenaga Kerja
3. Persentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
4. Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5. Jumlah informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini

PENINGKATAN OMZET USAHA MIKRO

DINKOP UKM

Sasaran :

- Meningkatkan Koperasi yang berkualitas
 - Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
- ###### Indikator :
- Persentase Koperasi yang berkualitas
 - Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan
 - Jumlah Usaha mikro mengalami kenaikan omzet

Indikator Program :

1. Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi
2. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
3. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
4. Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omzet

Indikator Kegiatan :

1. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
2. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
3. Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar
4. Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan
5. Jumlah Usaha mikro yang mengalami perkembangan produk

Angka Kunjungan Wisata

DISPORA

Sasaran :

- Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Ngawi
- Meningkatkan Prestasi Pemuda Pemudi Atlet Olahraga Kab. Ngawi ditingkat Nasional

Indikator :

- Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi / nasional
- Jumlah prestasi Atlet tingkat provinsi / nasional
- Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan
- Prosentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya

Indikator Program :

1. Prosentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
2. Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
3. Prosentase Keaktifan keaktifan organisasi kepramukaan
4. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota
5. Prosentase Pelaku ekonomi kreatif yang mengalami kenaikan omzet Kreatif

Indikator Kegiatan :

1. Prosentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Jumlah atlet berprestasi
3. Rata-rata kenaikan kunjungan wisata dalam satu tahun
4. Prosentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pemasarannya
5. Jumlah pembinaan kapasitas SDM pelaku pariwisata yang dilaksanakan

DPM & Desa

- ###### Indikator Kegiatan :
1. Jumlah Kerjasama Antar Desa
 2. Jumlah Bumdesma pasca program pengelolaan (DAPM-Bumdesma)

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

DPM & Desa

19 Kecamatan

Sasaran :

- Meningkatkan Status IDM kab. Dari berkembang menjadi maju
- ###### Indikator :
- Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
 - Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
 - Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indikator Program :

1. Persentase kondisi jalan desa baik tahun n
2. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
3. Jumlah desa yang menerapkan standar pelayanan minimal desa (SPM DESA)
4. Persentase Bumdes yang meningkat Statusnya dari berkembang menjadi maju
5. Persentase peningkatan status desa mandiri
6. Persentase RTM yang memiliki Usaha

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Kerjasama Antar Desa
2. Jumlah Bumdesa yang mempunyai usaha di sektor pertanian
3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 4

PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

DINAS PUPR

DINAS PRKP

DISHUB

Indikator Program :
Persentase Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Indikator Kegiatan :
Persentase jalan yang Dibangun

Indikator Kegiatan :

1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman
2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah aman

Indikator Kegiatan :
Jumlah infrastruktur pelengkapan jalan

REALISASI INVESTASI

DPMPSTP

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang disusun
- Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal yang dilaksanakan/dilikuti)
- Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang disusun)
- Persentase data base perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang tersedia dan Up Date Jumlah sarana dan prasarana informasi yang disediakan

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Indikator Kegiatan :
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

STABILITAS HARGA DAN KEAMANAN

SETDA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Satpol PP

Kesbangpol

Indikator Kegiatan :
Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75

Indikator Kegiatan :
Jumlah Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di susun

Indikator Kegiatan :
Persentase konflik sosial yang diselesaikan

PROSES
PENDUKUNG



PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 5

PROSES 5 (MAKMUR DAN BERDAYA SAING)

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Ketersediaan Pangan

Perlindungan &
Jaminan Sosial

Pemberdayaan Sosial

Rehabilitasi Sosial

Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk

Memperkecil Ketimpangan
Pendapatan

Pendukung

Pengembangan Teknologi dan
Informasi

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur

Kinerja Utama 5
Penurunan Kemiskinan



CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 5

Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Angka Kemiskinan	15,05-14,20 %	14,6-13,30 %	14,2-12,9 %	13,2-11,9 %	12,5-11,20 %	12,1-10,80 %



No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
5.	Penurunan Kemiskinan	Ketersediaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, DPMD, Dinas Kesehatan, Disdagnaker
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos, Dinkes, Dishub
		Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, DPMD
		Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PRKP, BPBD, Satpol PP
		Memperkecil Ketimpangan Pendapatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disdagnaker, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disparpora, DPMD
		Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	DP3AKB, DPMD, Dinkes
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur	DPUPR, DPRKP,
		Pengembangan Teknologi dan Informasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 5 PENURUNAN KEMISKINAN Indikator : Persentase Penduduk Miskin

PROSES UTAMA

PROSES
PENDUKUNG

KETERSEDIAAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sasaran :

Meningkatkan Ketersediaan & Pemanfaatan Pangan Masyarakat
Meningkatnya Produksi Pertanian

Indikator :

PPH Ketersediaan
PPH Konsumsi
Pertumbuhan Produksi Pertanian Unggulan Daerah

Indikator Program :

1. Persentase Ketersediaan Pangan
2. Persentase peningkatan cadangan pangan kabupaten kota
3. Prosentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)
4. Persentase daerah rentan rawan pangan
5. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Indikator Kegiatan :

1. Persentase kelompok yang menindaklanjuti penyediaan infrastruktur kemandirian pangan
2. Persentase pengembangan lembaga distribusi pangan
3. Persentase cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan yang disalurkan
4. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG
5. jumlah kegiatan penanganan daerah rawan pangan yang ditindaklanjuti
6. Jml pengawasan keamanan pangan segar

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah PUD dan Pembudidaya ikan yang diawasi
2. Jumlah hasil pengolahan dan pemasaran Perikanan
3. Persentase konsumsi ikan
4. Jumlah sarana dan prasarana produksi peternakan yang diadakan

DPMD

Indikator Kegiatan :

Persentase PKK Desa yang menindaklanjuti hasil pelatihan / pembinaan 10 program pokok PKK

DINAS KESEHATAN

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
2. Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan

DPPTK

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
2. Jumlah Dokumen harga dan stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya yang tersedia

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL

Sasaran :

Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi PPKS

Indikator :

Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya

Indikator Program :

1. Cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
2. Persentase penanganan bencana

DINAS KESEHATAN

Indikator Kegiatan :

Jumlah maskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran)

DINAS PERHUBUNGAN

Indikator Kegiatan :

Persentase pelayanan orang dan barang (Angkutan Anak Sekolah Gratis)

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

DINAS PUPR

Indikator Program :

1. Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk
2. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Indikator Kegiatan :

1. Panjang jalan yang dibangun
2. Persentase saluran drainase/ gorong2 /turap/ talud/ bronjong yang dibangun dalam satu tahun

DINAS PRKP

Indikator Kegiatan :

1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman
2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah aman



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 5 PENURUNAN KEMISKINAN Indikator : Persentase Penduduk Miskin

PROSES UTAMA

PEMBERDAYAAN SOSIAL

DINAS SOSIAL

Sasaran :
Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi PPKS
Indikator :
Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya

Indikator Program :
Jumlah PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

Indikator Kegiatan :
1. Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial
2. Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas

DINAS KOPERASI UKM

Indikator Program :
1. Persentase usaha mikro yang aktif pada tahun berkenaan
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
3. Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan
2. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
3. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan
4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
5. Jumlah Usaha mikro yang mengalami perkembangan produk

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Indikator Kegiatan :
Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Indikator Kegiatan :
1. Persentase bantuan sarana prasarana perikanan yang dimanfaatkan
2. Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan pembinaan

DPMD

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah Bumdesa yang mempunyai usaha di sektor pertanian
2. Jumlah Bumdesa yang memanfaatkan teknologi digital
3. Jumlah Bumdesma pasca program yang difasilitasi pengelolaannya (DAPM-Bumdesma)

DINAS PARIWISATA

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Jumlah pelatihan pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan

PROSES
PENDUKUNG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO

Indikator Kegiatan :
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 5

PENURUNAN KEMISKINAN

Indikator : Persentase Penduduk Miskin

REHABILITASI SOSIAL

PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

DINAS SOSIAL

DINAS KESEHATAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

SATPOL PP

BPBD

DP3AKB

DINAS KESEHATAN

DPMD

Sasaran :
Meningkatkan pelayanan dasar sosial bagi PPKS
Indikator :
Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya

Indikator Program :
1. Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
2. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani

Indikator Program :
Rasio rumah layak huni

Sasaran :
Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
Indikator :
TFR (Angka Kelahiran Total)

Indikator Program :
1. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
3. Persentase Poktan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang diintervensi

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
2. Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial
3. Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan

Indikator Kegiatan :
Jumlah hasil pertemuan koordinasi linprog dan linsek yang ditindaklanjuti (SELINTAS SAPU LIPAT / Sentuhan Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan)

Indikator Kegiatan :
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Indikator Kegiatan :
Jumlah Perda dan perkara yang di tegakkan (Razia Gepeng, Anak Jalanan, ODGJ, dll)

Indikator Kegiatan :
1. Persentase penanganan tangap darurat bencana
2. Persentase penanganan pasca bencana

Indikator Kegiatan :
1. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
2. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)
4. Persentase PKB dan Kader KB yang mempunyai kompetensi sesuai standart

Indikator Kegiatan :
1. jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan PUS
2. Jumlah Puskesmas yang melakukan kelas catin

Indikator Kegiatan:
Persentase Pokjanal Posyandu dan pokja posyandu yg menindaklanjuti hasil pembinaan dan pelatihan



LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 5

Persentase Penduduk Miskin

Indikator : Persentase Penduduk Miskin

MEMPERKECIL KETIMPANGAN PENDAPATAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

DINAS KOPERASI UKM

DINAS SOSIAL

DPPTK

DPMD

DINAS PARIWISATA

Sasaran :

Meningkatnya Produksi
Pertanian

Indikator :

Pertumbuhan Produksi
Pertanian Unggulan Daerah

Indikator Program :

1. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura
2. Persentase kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura yang meningkatkan nilai tambahnya secara ekonomi
2. Persentase kelompok yang menindaklanjuti penyediaan infrastruktur kemandirian pangan
3. Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya

Indikator Kegiatan :

1. Persentase bantuan sarana prasarana perikanan yang dimanfaatkan
2. Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan pembinaan

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan
2. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
3. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan
4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
5. Jumlah Usaha mikro yang mengalami perkembangan produk

Indikator Kegiatan :

1. Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial
2. Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas

Indikator Kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3. Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktifitas
4. Jumlah Penempatan tenaga Kerja
5. Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) Online (Sisnaker)

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Bumdesa yang mempunyai usaha di sektor pertanian
2. Jumlah Bumdesa yang memanfaatkan teknologi digital
3. Jumlah Bumdesma pasca program yang difasilitasi pengelolaannya (DAPM-Bumdesma)

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Jumlah pelatihan pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan
3. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omset



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 6

(MAKMUR DAN BERDAYA SAING)

PROSES 6

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Peningkatan
Infrastruktur

Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat

Pemberdayaan
Masyarakat

Pendukung

Pengembangan Teknologi dan
Informasi

Peningkatan Inovasi dan Daya
Saing

Kinerja Utama 6
Penurunan Ketimpangan
Pendapatan



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 6



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Gini	0,313-0,311	0.3682-0,3677	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
6.	Penurunan Ketimpangan Pendapatan	Peningkatan Infrastruktur	DPUPR, Dinas PRKP
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dinkop & UKM, Disdagnaker, Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinsos, DPMD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DP3AKB, Disparpora, 19 Kecamatan
		Pengembangan Teknologi dan Informasi	Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian
		Peningkatan Inovasi dan Daya Saing	Disparpora, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMD



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 6

PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Indikator : Indeks Gini

PROSES UTAMA

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian

Sasaran :

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah

Indikator :

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah)

Indikator Program :

1. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung), Perkebunan, hortikultura

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah komoditas tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura yang meningkat nilai tambahnya secara ekonomi
2. Persentase pemanfaatan sarana produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
3. Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik
4. Jumlah BPP dan sarana pendukung dalam kondisi baik

Dinkop UKM

Sasaran :

- Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
- Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Indikator :

- Persentase Koperasi yang berkualitas
- Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan
- Jumlah Usaha mikro mengalami kenaikan omset

Indikator Program :

1. Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi
2. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
3. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
4. Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset

Indikator Kegiatan :

1. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
2. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
3. Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar
4. Persentase Usaha Mikro Kecil yang Diberdayakan
5. Jumlah Usaha mikro yang mengalami perkembangan produk

DPPTK

Sasaran :

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri

Indikator :

- PDRB Sektor Perdagangan
- PDRB Sektor Industri

Indikator Program :

1. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
3. Jumlah Industri Baru

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Pengelola sarana prasarana perdagangan yang mengikuti pembinaan
2. Jumlah Penempatan tenaga Kerja
3. Persentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
4. Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5. Jumlah informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Sasaran :

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Indikator :

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Indikator Program :

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap
3. Persentase peningkatan produktivitas peternakan

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang naik kelas
2. Persentase bantuan Sarana Prasarana Perikanan yang dimanfaatkan
3. Jumlah unit data penyakit hewan yang teridentifikasi
4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis

DP3AKB

Sasaran :

Meningkatnya Status IDM kab. Dari berkembang menjadi maju

Indikator :

- Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indikator Program :

1. Persentase kondisi jalan desa baik tahun n
2. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
3. Jumlah desa yang menerapkan standar pelayanan minimal desa (SPM DESA)
4. Persentase Bumdes yang meningkat Statusnya dari berkembang menjadi maju
5. Persentase peningkatan status desa mandiri
6. Persentase RTM yang memiliki Usaha

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Kerjasama Antar Desa
2. Jumlah Bumdesa yang mempunyai usaha di sektor pertanian
3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM

Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian

Dinsos

19 Kecamatan

Indikator Kegiatan :

1. Persentase kelompok yang menindaklanjuti Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan
2. Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai kelebihannya

Indikator Kegiatan :
Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Daerah
Kabupaten/Kota

Support terhadap
keberhasilan
program
Pemerintah
Daerah



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 6 PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Indikator : Indeks Gini

PROSES UTAMA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dispora

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah pelatihan pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan
2. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omset
3. Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

DINAS PUPR

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator :

- Persentase panjang jalan yang tertangani dalam kondisi baik

Indikator Program :

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk

Indikator Kegiatan :

Panjang jalan yang Dibangun

DINAS PRKP

Indikator Kegiatan :

1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman
2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah aman

PENINGKATAN INOVASI DAN DAYA SAING

DPM Desa

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Kerjasama Antar Desa
2. Jumlah Bumdesa yang mempunyai usaha di sektor pertanian
3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM

DISPORA

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Jumlah atlet berprestasi
3. Rata-rata kenaikan kunjungan wisata dalam satu tahun
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pemasarannya
5. Jumlah pembinaan kapasitas SDM pelaku pariwisata yang dilaksanakan

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah komoditas tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura yang meningkat nilai tambahnya secara ekonomi
2. Persentase pemanfaatan sarana produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah komoditas peternakan unggulan daerah yang dioptimalkan budidayanya
2. Jumlah pelaku usaha peternakan yang meningkat kemampuan agribisnisnya

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Indikator Kegiatan :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

PROSES PENDUKUNG



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 7

PROSES 4 (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Penataan
Organsasi
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Penguatan
dan
Pengawasan
Penguatan
Akuntabilitas

Penataan
Tata Laksana
Penataan
SDM
Aparatur

Deregulasi
Kebijakan
Manajemen
Perubahan

Pendukung

Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah

Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah

Kinerja Utama 7

Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan
publik



CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 7



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Reformasi Birokrasi	69,70 - 70,10	72,50 - 73,95	74,75 - 76,20	76,40 - 77,85	77,55 - 79,00	78,95 - 80,40

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
7.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
		Deregulasi Kebijakan	Bag. Hukum, Setwan
		Penataan SDM Aparatur	BKPSDM, Bag. Organisasi
		Penataan Tata Laksana	Bagian Organisasi, BKPSDM, DisKominfo
		Penguatan Akuntabilitas	Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat, Bakeu
		Penguatan Pengawasan	Inspektorat, Bappeda, Bakeu
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Diskominfo, Dispenduk Capil, DPMPSTP, Dinkes, 19 Kecamatan
		Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappeda
		Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda, Semua PD
		Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeu, Semua PD

LOGFRAME KINERJA UTAMA 7

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

PROSES UTAMA

Penataan Organisasi	Deregulasi Kebijakan		Penataan SDM Aparatur		Penataan Tata Laksana		
BAG ORGANISASI	BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	BKPSDM	BAG ORGANISASI	BAG ORGANISASI	BKPSDM	KOMINFO
<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Kebijakan <u>Indikator :</u> Persentase kebijakan strategis bidang administrasi umum (SAKIP & RB) yg ditindaklanjuti & tepat waktu			<u>Sasaran :</u> Meningkatnya kualitas ASN berbasis sistem merit <u>Indikator :</u> 1. Persentase ASN dengan penilaian kinerja kategori baik 2. Persentase ASN mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi		<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Kualitas Kebijakan <u>Indikator :</u> Persentase kebijakan strategis bidang administrasi umum (SAKIP & RB) yg ditindaklanjuti & tepat waktu		
<u>Indikator Program :</u> Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai			<u>Indikator Program :</u> Tingkat Pemenuhan jabatan sesuai kebutuhan		<u>Indikator Program :</u> Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai		
<u>Indikator Kegiatan :</u> Jumlah dokumen kajian bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang ditindaklanjuti (Penyusunan SOTK)	<u>Indikator Kegiatan :</u> Jumlah rancangan produk hukum daerah yang di fasilitasi,sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	<u>Indikator Kegiatan :</u> Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Jumlah Dokumen kebutuhan & formasi ASN yang disusun; 2. Jumlah PNS yang mengalami mutasi jabatan sesuai kompetensi 3. Jumlah pengisian jabatan sesuai kompetensi	<u>Indikator Kegiatan :</u> Jumlah dokumen kajian bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang ditindaklanjuti (Penyusunan Anjab ABK)	<u>Indikator Kegiatan :</u> Jumlah dokumen kajian bidang pelayanan publik dan tatalaksana yang ditindaklanjuti	<u>Indikator Kegiatan :</u> 1. Jmlh dokumen Perencanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti 2. Jmlh PNS dengan Penilaian Prestasi Kerja kategori baik 3. Jmlh kasus pelanggaran disiplin yang ditangani 4. Jmlh peserta diklat teknis yang mendapatkan sertifikat 5. Jmlh peserta diklatpim yang mendapatkan sertifikat 6. Jmlh peserta sertifikasi kompetensi yang mendapatkan sertifikat	<u>Indikator Kegiatan :</u> Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota



LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 7

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

PROSES UTAMA

Penguatan Akuntabilitas

BAG ORGANISASI

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Kebijakan
Indikator :
Persentase kebijakan strategis bidang administrasi umum (SAKIP & RB) yg ditindaklanjuti & tepat waktu

Indikator Program :
Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai

Indikator Kegiatan :
Jumlah dokumen kajian bidang kinerja dan RB yang ditindaklanjuti

INSPEKTORAT

Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indikator :
Rata-rata nilai SAKIP PD

Indikator Program :
1. Persentase rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti
2. Persentase Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah laporan hasil pengawasan internal pemerintah daerah yang disusun tepat waktu
2. Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun tepat waktu

BAPPEDA

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat Waktu
2. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang minimal kategori baik

BAKEU

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah regulasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu
2. Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu
3. Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP

Penguatan Pengawasan

INSPEKTORAT

Sasaran :
Meningkatnya Nilai Level Kapabilitas APIP
Indikator :
Nilai Kapabilitas APIP

Indikator Program :
1. Persentase Rekomendasi atas hasil pengaduan yang ditindaklanjuti
2. Persentase Objek Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti
3. Persentase Kebijakan Pengawasan yang disusun

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Kebijakan Pengawasan yang disusun
2. Persentase Objek Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti

BAPPEDA

Indikator Kegiatan :
1. Persentase Tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik
2. Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah kategori baik

BAKEU

Indikator Kegiatan :
Jumlah regulasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu

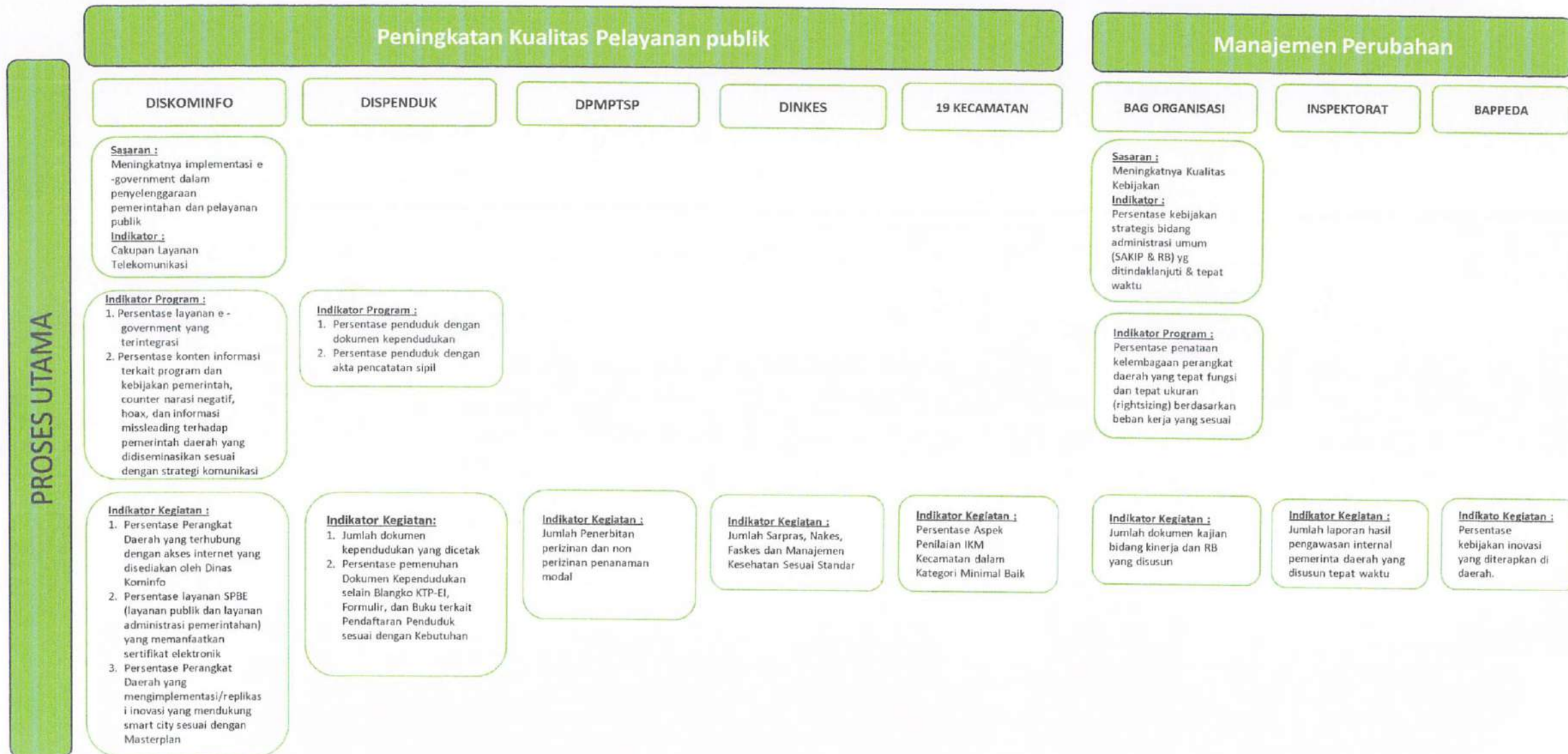


Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 7

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi





Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 7

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

PROSES PENDUKUNG

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Sasaran :

Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan

Indikator :

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program :

1. Rata-Rata Capaian Kinerja Program
2. Persentase Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat Waktu

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik
2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang difasilitasi penetapannya

Semua PD

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, & evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

BAKEU

Sasaran :

Tercapainya Opini BPK WTP

Indikator :

1. Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib

Indikator Program :

1. Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu
2. Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD
3. Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah regulasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu
2. Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu
3. Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP

Semua PD

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen & laporan keuangan yang disusun tepat waktu



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 8

PROSES 8 (INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Penyediaan
Infrastruktur Air
Limbah

Penyediaan
Infrastruktur Air
Bersih

Penyediaan
Infrastruktur
Perumahan

Penyediaan Jalan
dan Jembatan

Penyediaan
Transportasi

Penyediaan
Infrastruktur
Irigasi

Penyediaan
Infrastruktur
Persampahan

Pendukung

Kualitas lingkungan hidup

Ketangguhan Daerah dan
Masyarakat dalam Menghadapi
Bencana

Kinerja Utama 8
Kualitas Infrastruktur Yang
Berkelanjutan



CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 8



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	58,62-60	60-65	65-68	68-70	70-72	72-74

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
8.	Kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Penyediaan jalan dan jembatan	Dinas PUPR, DPM Desa, Pemerintah Desa
		Penyediaan transportasi	Dinas Perhubungan
		Penyediaan infrastruktur perumahan	Dinas PRKP, DLH, Kominfo
		Penyediaan infrastruktur air bersih	Dinas PUPR, Dinas PRKP
		Penyediaan infrastruktur air Limbah	Dinas PRKP
		Penyediaan infrastruktur Irigasi	Dinas PUPR, DKPP
		Penyediaan infrastruktur persampahan	Dinas LH
		Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Ketangguhan Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana	BPBD



LOGFRAME KINERJA UTAMA 8

KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

PROSES UTAMA

PENYEDIAAN JALAN DAN JEMBATAN

DINAS PUPR

DPM DESA

PEMERINTAH
DESA

Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator :

Persentase Panjang jalan yang tertangani dalam kondisi baik

Indikator Program :

Rasio Panjang jalan terhadap jumlah penduduk

Indikator Kegiatan :

Panjang jalan yang dibangun

Indikator Kegiatan :

Jumlah Desa yang terfasilitasi Sarpras Jalan Desa

Support melalui pendanaan ADD dan DD

PENYEDIAAN TRANSPORTASI

DINAS PERHUB

Sasaran:

Mengurangi angka kecelakaan lalulintas

Indikator :

Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan

Indikator Program :

Persentase kecelakaan lalulintas

Indikator Kegiatan :

Persentase sarana lalulintas dalam kondisi baik

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN

DINAS PRKP

DINAS LH

DISKO
MINFO

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar

Indikator :

Cakupan permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU

Indikator Program :

Persentase peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum
Persentase permukiman yang tertata

Indikator Kegiatan

1. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana & utilitas umum)
2. Jumlah infrastruktur Kawasan permukiman yang dibangun

Indikator Kegiatan :

Luas taman yang dibangun

Indikator Kegiatan :

1. Proporsi rumah tangga dengan akses internet
2. Jumlah fasilitasi pengembangan infrastruktur



LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 8 KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

PROSES UTAMA

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH

DINAS PRKP

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar

Indikator :

Cakupan permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU

Indikator Program :

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum yang layak

Indikator Kegiatan

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH

DINAS PRKP

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar

Indikator :

Cakupan permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU

Indikator Program :

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Indikator Kegiatan :

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR IRIGASI

DINAS PUPR

DINAS KETAHANAN
PANGAN &
PERTANIAN

Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator :

Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator Program :

Rasio Jaringan Irigasi

Indikator Kegiatan :

1. Persentase luas sawah yang beririgasi
2. Persentase Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik

Indikator Kegiatan :
Jumlah Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN

DINAS LH

Sasaran :

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas serta Tanggap terhadap perubahan iklim

Indikator :

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indikator Program :

Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan

Indikator Kegiatan :

Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan



LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 8 KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

PROSES PENDUKUNG

Kualitas Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran :

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas serta Tanggap terhadap perubahan Iklim

Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Program :

Indeks kualitas Air & Indeks kualitas Udara

Indikator Kegiatan :

Persentase kualitas air & udara yang memenuhi baku mutu

Ketangguhan Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana

BPBD

Sasaran :

Meningkatnya Ketangguhan Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Indikator :

Indeks Ketahanan Daerah

Indikator Program :

Persentase perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

Indikator Kegiatan :

Persentase penanganan tangap darurat bencana



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 9

(GOTONG-ROYONG)

PROSES 9

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi,
Tata Laksana & SDM

Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Penanganan
Tematik Kawasan
Rawan Bencana

Perkuatan
Kebijakan &
Kelembagaan

Peningkatan
Efektivitas
Pencegahan &
Mitigasi Bencana

Pengembangan
Sistem
Pemulihan
Bencana

Pengembangan
Sistem Informasi
Diklat & Logistik

Pengkajian Resiko
& Perencanaan
Terpadu

Peningkatan
Kesiapsiagaan &
Penanganan
Darurat Bencana

Pendukung

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Kinerja Utama 9
Kualitas Lingkungan Hidup yang
Sehat dan Tangguh Bencana



CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 9



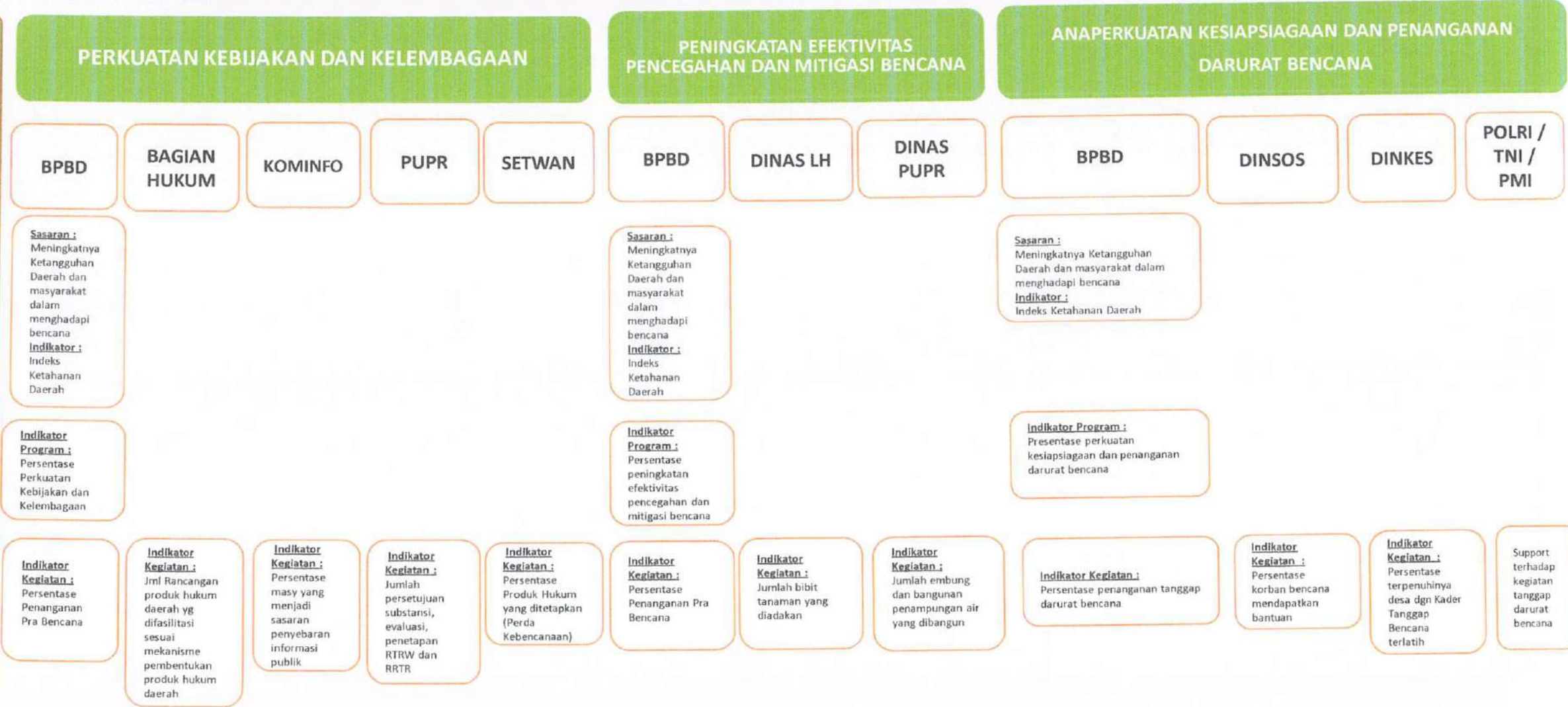
Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Resiko Bencana	119,71-119,50	119,34-119,11	118,84-117,84	116,98-115,98	115,11-114,11	113,24-112,24

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
9.	Kualitas Lingkungan hidup yang sehat dan Tangguh Bencana	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	BPBD, Bagian Hukum Setda, Diskominfo, DPUPR, Setwan
		Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	BPBD, DLH, DPUPR
		Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	BPBD, Dinsos, Dinkes, POLRI, TNI, PMI
		Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	BPBD, Bagian Hukum Setda
		Penanganan tematik kawasan rawan bencana	BPBD, Diskominfo, Dinkes, Dindik
		Pengembangan sistem pemulihan bencana	BPBD, Dinsos, Dinas PRKP, Dinkes
		Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	BPBD, Dinsos
		Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana	BPBD, Pemerintah Desa



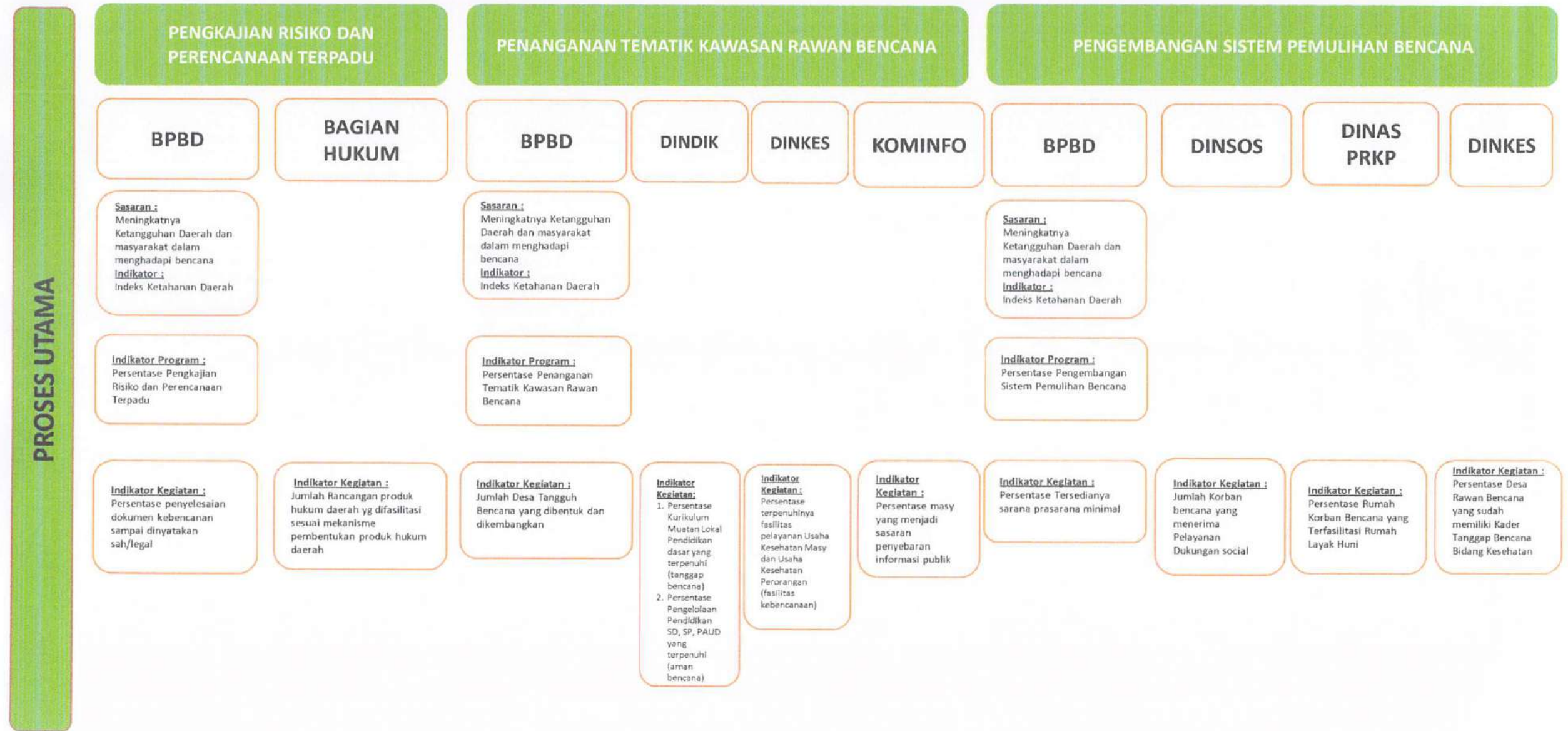
LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 9
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN TANGGUH BENCANA
Indikator : Indeks Resiko Bencana

PROSES UTAMA





LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 9
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN TANGGUH BENCANA
Indikator : Indeks Resiko Bencana





LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 9

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN TANGGUH BENCANA

Indikator : Indeks Resiko Bencana

PROSES UTAMA

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK

BPBD

DINSOS

Sasaran :

Meningkatnya Ketangguhan Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Indikator :

Indeks Ketahanan Daerah

Indikator Program :

Persentase Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan
3. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Indikator Kegiatan :

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LANJUTAN LOGFRAME KINERJA UTAMA 9 KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN TANGGUH BENCANA Indikator : Indeks Resiko Bencana

PROSES PENDUKUNG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

BPBD

PEMERINTAH
DESA

Indikator Program :

Persentase peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana

Indikator Kegiatan :

1. Persentase Penanganan Pra Bencana
2. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Forum PRB

Suport melalui
pendanaan ADD
dan DD



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

PROSES BISNIS KINERJA UTAMA 10

PROSES 10
(GOTONG ROYONG)

Manajemen

Perencanaan

Penganggaran

Pengelolaan Organisasi, Tata
Laksana & SDM

Pengawasan, Pengendalian dan
Evaluasi

Utama

Penyelesaian
Pelanggaran K3
(Keterlibatan,
Ketertarikan,
Keindahan)

Penurunan
Angka
Konflik

Peningkatan
Nilai
Keagamaan

Pelestarian
Seni &
Budaya

Pendukung

Pencegahan terhadap Pelanggaran Norma

Kinerja Utama 10
PENGUATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN
DAN BUDAYA LOKAL



CROSS CUTTING KINERJA UTAMA 10



Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Kesalehan Sosial	72,1-74,5	73,1-75,8	76,8-78,5	77,8-81,2	80,5-82,9	81,8-83,7

No	Kinerja Utama	Aspek Pembentuk	Perangkat Daerah
10.	Penguatan Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal	Peningkatan nilai keagamaan	Setda (Bagian Adminstrasi Kesra), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Satpol PP, 19 Kecamatan
		Penurunan Angka Konflik	Kesbangpol, 19 Kecamatan
		Pelestarian Seni dan Budaya	Disparpora, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pencegahan terhadap pelanggaran Norma	Satpol PP, Kesbangpol, Dispora, Dinas Dikbud, Dinsos, DP3AKB



Pemerintah
Kabupaten Ngawi

LOGFRAME KINERJA UTAMA 10

PENGUATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA LOKAL

Indikator : Indeks Kesalehan Sosial

PROSES UTAMA

PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, KEINDAHAN)

SATPOL PP

19
KECAMATAN

Sasaran :
Meningkatkan ketertiban dan ketertiban umum
Indikator :
Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum

Indikator Program :
Persentase hasil pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditindak lanjuti

Indikator Kegiatan :
Jumlah laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

PENURUNAN ANGKA KONFLIK

KESBANG
POL

19
KECAMATAN

Sasaran :
Meningkatnya kerukunan masyarakat
Indikator :
Angka konflik SARA

Indikator Program :
1. Jumlah konflik Agama
2. Jumlah konflik sosial

Indikator Kegiatan :
1. Persentase konflik agama yang diselesaikan
2. Persentase konflik sosial yang diselesaikan

Indikator Kegiatan :
Jumlah laporan hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan yang ditindaklanjuti

Indikator Program :
Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindak lanjuti perangkat daerah terkait

Indikator Kegiatan :
Jumlah laporan hasil fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

PENGUATAN NILAI KEAGAMAAN

SETDA
(KESRA)

DINDIKBUD

Indikator Kegiatan :
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar yg terpenuhi

PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN NORMA

KESBANGPOL

SATPOL PP

DINSOS

DINAS
DIKBUD

DISPORA

DP3AKB

Indikator Program :
Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Indikator Kegiatan :
Persentase hasil pencegahan gangguan ketertiban umum & ketentraman masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator Kegiatan :
Jumlah kebijakan teknis bidang ideologi Pancasila & karakter kebangsaan yang ditindaklanjuti

Indikator Kegiatan :
Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

Indikator Kegiatan :
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar yang terpenuhi

Indikator Kegiatan :
Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Indikator Kegiatan :
1. Rasio KDRT
2. Persentase anak korban kekerasan

PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indikator Program :
1. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
2. Persentase kelompok seni budaya dan budaya adat yang difasilitasi

Indikator Kegiatan :
1. Jumlah cagar budaya kabupaten yang dikelola
2. Jumlah seni tradisional dan budaya adat tradisi yang dilestarikan
3. Persentase pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan yang terpenuhi
4. Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang terpenuhi

DINAS PERPUSTAKAAN

Indikator Kegiatan :
Jumlah naskah kuno yang dilestarikan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

PROSES PENDUKUNG